

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan usaha sistematis serta berkelanjutan yang tujuannya meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan kerja serta pemerataan hasil pembangunan. Konsep ini bukan hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi semata akan tetapi mencakup dimensi sosial serta kesejahteraan manusia. Menurut Todaro dan Smith pembangunan ekonomi yang ideal ialah pembangunan yang mampu mengurangi kesenjangan dalam pendapatan menurunkan kemiskinan serta memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dengan demikian pembangunan ekonomi memiliki peran penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh¹.

Namun pada prakteknya, pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sering menimbulkan ketimpangan sosial dan distribusi yang tidak merata. Banyak di negara berkembang peningkatan produk domestik regional bruto belum tentu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah. Oleh karena itu pendekatan pembangunan ekonomi penting diarahkan pada aspek keadilan sosial dan pemerataan hasil sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok miskin dan rentan

Pada konsep Islam pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi terhadap pertumbuhan materi saja, tapi juga mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial. Ekonomi Islam menempatkan Al adl(keadilan) sebagai prinsip utama pada seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan perspektif Islam bermakna menempatkan segalasesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak². ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹ Todaro dan Smith, *Economic Development*.

² Jajang W. Mahri dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam* (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021).

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat³.

Dengan demikian, pada pandangan Islam pembangunan harus diarahkan guna mencapai keadilan distributif yaitu pemerataan kesejahteraan bukan hanya pemusatan kekayaan pada kelompok tertentu keadilan ekonomi Islam juga dapat diwujudkan melalui mekanisme distribusi kekayaan yang fungsinya untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin⁴. Konsep Islam juga menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam bertujuan untuk menyeimbangkan antara kebebasan individu serta tanggung jawab sosial guna mencapai masalah *a'mmah* atau kesejahteraan umum. Maka dari itu, penerapan nilai keadilan ekonomi Islam menjadi bagian integral dari pembangunan yang berkeadilan di mana kesejahteraan tidak hanya dinilai dari pertumbuhan ekonomi tapi juga dinilai dari sejauh mana pembangunan dapat menciptakan pemerataan serta solidaritas sosial.

Permasalahan pembangunan ekonomi pada suatu negara tidak jauh dari masalah kemiskinan dan kesejahteraan yang tidak merata. Saat pembangunan tidak berjalan dengan baik dan tidak merata maka akan menimbulkan banyak permasalahan salah satunya kemiskinan⁵. Permasalahan kemiskinan bukan hanya menimpa negara-negara dunia ketiga saja melainkan juga pada negara-negara yang sudah berkembang bahkan pada negara maju sekalipun. Hal ini dikarenakan di samping kemiskinan berkaitan dengan orang yang tidak mampu membiayai hidup secara layak (kemiskinan absolut) juga berkaitan dengan ketimpangan antara penduduk yang berpenghasilan tinggi dengan penduduk yang berpenghasilan rendah. Pada setiap negara di dunia terdapat orang-orang yang hidup dalam kemiskinan bahkan di negara terkaya di dunia sekalipun masyarakat

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

⁴ Chapra, *Islam and the Economic Challenge*.

⁵ Farida Amalia dkk., "Indikator Pembangunan Terhadap Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Dakwah Islam," *Al-Tsiqoh : Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam* 7, no. 2 (2023): 62–71, <https://doi.org/10.31538/altsiq.v7i2.2924>.

termiskin seringkali tinggal di perumahan yang buruk⁶.

Salah satu masalah pelik yang masih dihadapi oleh negara Indonesia yaitu masalah penduduk yang masih di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data dari badan pusat statistik BPS tercatat tingkat kemiskinan negara Indonesia pada tahun 2016 tercatat 10,70% setara dengan 27, 76 juta orang. Trend penurunan berlanjut secara konsisten seiring dengan stabilitas ekonomi serta menguatnya kebijakan perlindungan sosial. Pada tahun 2019 angka kemiskinan mengalami penurunan hingga 9,22% yang merupakan pencapaian terendah sepanjang sejarah penurunan kemiskinan secara nasional. Penurunan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil di kisaran 5% peningkatan produktivitas pada sektor industri dan jasa serta perluasan program bantuan sosial seperti PKH, BPNT dan dana desa. Namun pencapaian tersebut mengalami gangguan yang serius akibat pandemi covid 19 yang melanda negara Indonesia pada tahun 2020. Pembatasan aktivitas ekonomi, penurunan konsumsi rumah tangga serta peningkatan pengangguran menyebabkan lonjakan tingkat kemiskinan. Pada bulan Maret 2021 angka kemiskinan meningkat jadi 10,14% atau 27,54 juta penduduk kembali mendekati kondisi tahun 2017⁷.

Memasuki masa pemulihan pada tahun 2022 sampai 2024, kebijakan ekonomi nasional melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN), bantuan langsung tunai (BLT) dan pemulihan sektor UMKM berhasil menekan dampak pandemi secara bertahap. Di tahun 2022 angka kemiskinan kembali turun menjadi 9,54% dan pada tahun 2023 turun lagi menjadi 9,36% (BPS 2023). Dengan pulihnya mobilitas di masyarakat serta meningkatnya daya beli rumah tangga dampak pemulihan ini semakin tampak pada tahun 2024. Badan pusat statistik melaporkan bahwa pada Maret 2024 tingkat kemiskinan di nasional berada pada kisaran 9,03% mendekati level pra pandemi (BPS 2024). Selama ini pemerintahan

⁶ Max Roser, "Global poverty in an unequal world: Who is considered poor in a rich country? And what does this mean for our understanding of global poverty?," *Our World in Data*, 2023, <https://ourworldindata.org/higher-poverty-global-line>.

⁷ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 10,14 persen," <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>.

Indonesia telah menjalankan berbagai program dalam upaya menurunkan kemiskinan. Upaya menurunkan kemiskinan umumnya ditempuh melalui dua strategi. Pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan primer mereka. Kedua, memberikan pelatihan kepada mereka supaya memiliki keterampilan life skill dalam berusaha mencari nafkah sehingga dapat menekan terjadinya kemiskinan yang baru. Upaya penetasan kemiskinan ini dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur⁸.

Setelah menggambarkan dinamika kemiskinan pada tingkat nasional, keadaan kemiskinan di provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia pada periode 2016 sampai 2024 menunjukkan pola fluktuatif yang juga dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi regional, dinamika demografi urbanisasi serta ketimpangan wilayah Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, lebih dari 49 juta jiwa memiliki tantangan kemiskinan yang bersifat kompleks terutama karena tingginya kepadatan penduduk ketimpangan antar wilayah dan tingginya jumlah pekerja informal.

Pada tahun 2016, angka kemiskinan di provinsi Jawa Barat tercatat sebesar 8,95%, atau sekitar 4,44 juta penduduk miskin⁹. Angka ini berada sedikit di bawah rata-rata nasional saat itu, akan tetapi beban absolutnya sangat besar karena populasi di provinsi Jawa Barat yang tinggi. Penurunan kemiskinan berlangsung konsisten hingga 2019, ketika angka kemiskinan mencapai 6,82%, yang merupakan level terendah dalam satu dekade¹⁰. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kinerja ekonomi daerah, pertumbuhan sektor industri pengolahan dan jasa, percepatan urbanisasi, serta program bantuan sosial yang diperluas oleh pemerintah daerah melalui sinergi dengan pemerintah pusat.

⁸ Ferezagia, *Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia*.

⁹ Barat, "Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2017."

¹⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, "Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2020," <https://jabar.bps.go.id/id/publication/2020/04/27/cfab9a400cf304f800182a5f/provinsi-jawa-barat-dalam-angka-2020.html>.

Namun, pandemi covid 19 di tahun 2020 memberikan tekanan signifikan pada kondisi sosial ekonomi di provinsi Jawa Barat. Provinsi ini menjadi salah satu wilayah dengan kasus covid 19 tertinggi dan memiliki banyak kabupaten atau kota industri yang sangat terpengaruh dengan pembatasan aktivitas. Dampaknya tingkat kemiskinan kembali naik menjadi 8,40% pada tahun 2021 setara dengan lebih dari 4,17 juta penduduk miskin¹¹. Pemutusan hubungan kerja atau PHK di kawasan industri kota Bekasi, kota Karawang, dan kota Purwakarta, penurunan aktivitas perdagangan dan melemahnya konsumsi rumah tangga menjadi faktor utama kembali naiknya kemiskinan tersebut. Pada periode pemulihan tahun 2022 sampai 2024 pemerintah provinsi Jawa Barat bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota melakukan berbagai program termasuk program perlindungan sosial terpadu, penguatan UMKM dan pemulihan sektor industri. Seiring membaiknya mobilitas masyarakat serta aktivitas produksi angka kemiskinan kembali menurun pada tahun 2022 kemiskinan turun menjadi 7,88% kemudian turun menjadi 7,62% pada tahun 2023¹². Pada Maret 2024, BPS mencatat angka kemiskinan Jawa Barat berada pada kisaran 7,41%, mendekati tren pra-pandemi¹³

Meskipun demikian terdapat karakteristik struktural yang menjadikan kemiskinan di provinsi Jawa Barat tetap menjadi isu strategis. Pertama distribusi kemiskinan tidak merata pada antar wilayah kabupaten/kota di wilayah Selatan Jawa Barat seperti kabupaten Garut kabupaten Tasikmalaya, kabupaten Ciamis dan kabupaten Sukabumi secara konsisten mencatat angka kemiskinan lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah utara atau metropolitan seperti Bandung,

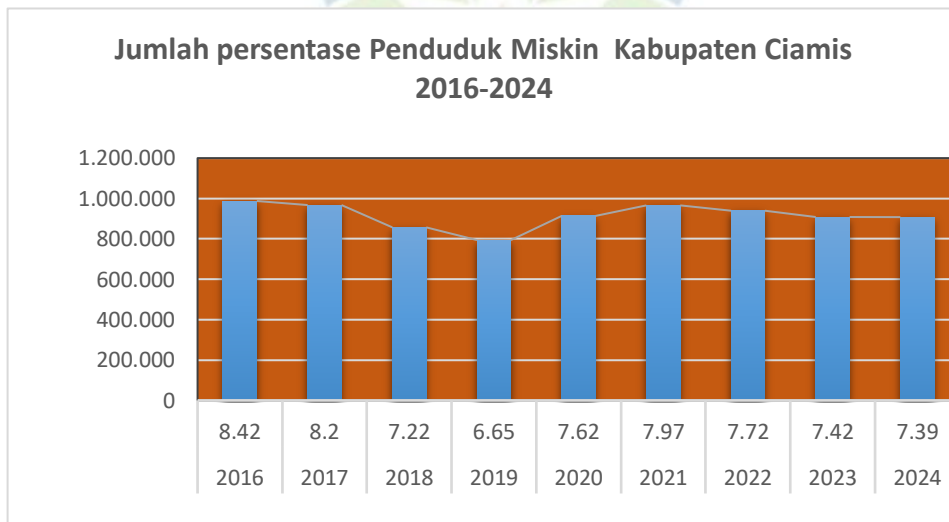
¹¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, “Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2021,” , <https://jabar.bps.go.id/id/publication/2021/02/26/4d3f7ec6c519dda0b9785d45/provinsi-jawa-barat-dalam-angka-2021.html>.

¹² Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, “Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2023,” <https://jabar.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/57231a828abbfd50a21fe31/provinsi-jawa-barat-dalam-angka-2023.html>.

¹³ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, “Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2024,” <https://jabar.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/35ffe2d35104b39feb577e8f/provinsi-jawa-barat-dalam-angka-2024.html>.

Bekasi dan Depok ketimpangan ini disebabkan adanya perbedaan struktur ekonomi, aksesibilitas, infrastruktur serta kualitas sumber daya manusia ¹⁴.

Setelah melihat dinamika tingkat kemiskinan pada level nasional dan provinsi, perlu juga meninjau lebih lanjut kondisi kemiskinan di kabupaten Ciamis pada periode 2016 sampai 2024 sebagai lokus dalam penelitian ini. Kabupaten Ciamis merupakan salah satu daerah di wilayah Priangan Timur yang secara historis menghadapi tantangan struktural ekonomi, geografis dan sosial sehingga tingkat kemiskinannya cenderung lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Barat. Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan di kabupaten Ciamis tercatat sebesar 8,84% atau setara dengan lebih dari 178.000 penduduk miskin (BPS Ciamis 2007).. Berikut grafik jumlah dan persentase penduduk miskin kabupaten Ciamis tahun 2016-2024.



Gambar 1.1

Pesentae Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2024

Menurut badan pusat statistik Kabupaten Ciamis pada tahun 2016-2019 tren kemiskinan di Kabupaten Ciamis menunjukkan penurunan yang cukup stabil seiring peningkatan aktivitas ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, dan penguatan program perlindungan sosial melalui integrasi data kemiskinan berbasis desa. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,65% yang

¹⁴ BAPPEDA JABAR, t.t., <https://bappeda.jabarprov.go.id/documents/dokumen-publikasi-data-dan-informasi-tahun-2023/>.

merupakan titik terendah sebelum adanya pandemi covid. Penurunan ini didukung dengan peningkatan produktivitas UMKM pertumbuhan sektor jasa serta perluasan pemanfaatan dana desa yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi lokal namun adanya pandemi covid pada tahun 2020 memberikan guncangan yang signifikan bagi kabupaten Ciamis. Pembatasan aktivitas ekonomi yang berpengaruh pada sektor perdagangan pariwisata dan usaha mikro yang merupakan penopang pendapatan masyarakat di kabupaten Ciamis titik dampaknya kemiskinan kembali meningkat menjadi 7,97% di tahun 2021. Penurunan pendapatan rumah tangga tingginya pengangguran dan terbatasnya aktivitas ekonomi desa menjadi faktor pendukung meledaknya kemiskinan pada periode tersebut.

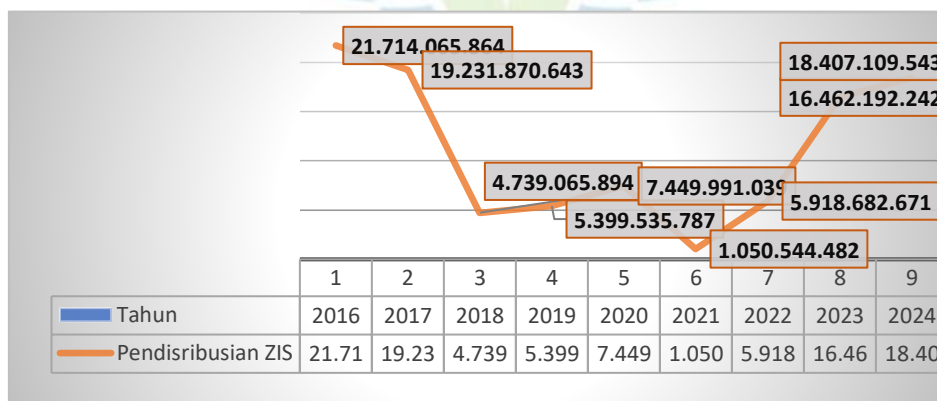
Memasuki masa pemulihan di tahun 2022 sampai 2024 berbagai program strategis ditingkatkan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat termasuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN), bantuan sosial pangan, penguatan UMKM berbasis digital dan pemberdayaan desa wisata. Dampaknya, angka kemiskinan di Ciamis kembali menunjukkan tren penurunan pada tahun 2022 yaitu menjadi 7,72% lalu menjadi 7,42% pada tahun 2023 pada Maret 2024. Badan pusat statistik mencatat tingkat kemiskinan kabupaten Ciamis berada di kisaran 7,39% mendekati kondisi sebelum pandemi dan menunjukkan pemulihan yang cukup positif.

Pengetesan kemiskinan sudah sejak lama menjadi prioritas dalam strategi pembangunan ekonomi nasional. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menggunakan sejumlah instrumen yang basisnya pada budaya dan agama setempat dalam hal ini sistem zakat, infaq dan shodaqoh dianggap sebagai salah satu cara tradisional yang paling efektif guna mengatasi masalah kemiskinan¹⁵. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, instrumen zakat, infaq dan shodaqoh diharapkan menjadi lebih baik dan dapat mengurangi kemiskinan. Dalam Islam, zakat infaq dan shodaqoh dapat

¹⁵ Mustika dkk., "Analysis Of Effect Of ZIS (Zakat, Infaq, And Shadaqah), Regional Domestic Products Of Bruto, Regional Minimum Wage And Inflation On Levels Poverty In Indonesia 2012 – 2016."

memberikan peluang bagi masyarakat guna mengurangi masalah ekonomi. pada bidang ekonomi, masyarakat muslim yang memiliki harta lebih dapat mengurangi kemiskinan dengan membayar zakat. Agar tidak terjadi ketimpangan sosial yang signifikan, masyarakat yang memiliki banyak harta harus membantu orang lain yang tidak memiliki banyak harta.

Sebagai lembaga resmi pemerintah secara nasional, badan zakat nasional bertanggung jawab untuk mengelola dana zakat secara teratur dan menetapkan strategi untuk membagi dana zakat infaq dan shodaqoh. Sektor-sektor utama yang diprioritaskan dalam penyaluran zakat ditetapkan oleh Baznas; ini termasuk sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, kemanusiaan, dan agama. Dengan mendorong sektor-sektor ini, diharapkan zakat dapat berkontribusi lebih besar dalam memerangi kemiskinan. Jika dikelola dengan baik dan profesional, lembaga zakat dapat memainkan peran penting dalam menurunkan kemiskinan. Berdasarkan data yang dipeoleh dari BAZNAS Kabupaten Ciamis jumlah dana ZIS yang terdistribusikan tahun 2016-2024 tergambar sebagai berikut:



Gambar 1.2

Distribusi Dana Zis Baznas Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2024

Grafik Distribusi ZIS di Kabupaten Ciamis menunjukkan fluktuasi cukup tajam sepanjang periode 2016–2024. Pada tahun 2016, pendistribusian ZIS tercatat sebesar Rp21,714 miliar, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2017 menjadi Rp19,231 miliar. Dua tahun ini memperlihatkan kinerja distribusi ZIS yang masih relatif stabil pada kisaran di atas Rp19 miliar. Memasuki tahun 2018, terjadi penurunan signifikan hingga mencapai Rp4,739

miliar, atau turun lebih dari 75% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan distribusi ZIS pada tahun 2018–2019 sangat mungkin terkait dengan dua faktor utama. Pertama, pada periode tersebut BAZNAS daerah sedang menjalani penataan kelembagaan dan penyesuaian regulasi, termasuk pembaruan sistem Unit Pengumpul Zakat (UPZ), peningkatan standar pelaporan, serta pembenahan mekanisme distribusi sesuai UU No. 23 Tahun 2011 dan regulasi lanjutan. Melewati tahun 2019, nilai distribusi ZIS kembali mengalami kenaikan menjadi Rp5,399 miliar, meskipun belum mampu menyamai capaian tahun-tahun awal.

Pada tahun 2020, pendistribusian ZIS meningkat menjadi Rp7,449 miliar, yang mungkin dipengaruhi oleh meningkatnya solidaritas sosial masyarakat pada masa awal pandemi COVID-19. Namun pada tahun 2021, pendistribusian kembali menurun drastis hingga berada pada titik terendah dalam rentang penelitian, yakni Rp1,050 miliar. Kondisi ini dapat dihubungkan dengan melemahnya kemampuan ekonomi masyarakat selama masa pandemi yang berkepanjangan. Memasuki tahun 2022, kondisi mulai membaik dengan meningkatnya distribusi ZIS menjadi Rp5,918 miliar, menandakan adanya pemulihan ekonomi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembayaran ZIS. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dan 2024, di mana nilai pendistribusian meningkat signifikan masing-masing menjadi Rp16,462 miliar dan Rp18,407 miliar. Dua tahun terakhir menunjukkan pemulihan yang sangat kuat dan mendekati kembali pola distribusi yang tinggi seperti tahun 2016–2017.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa pendistribusian dana ZIS di Kabupaten Ciamis bersifat sangat fluktuatif, dipengaruhi oleh dinamika ekonomi lokal, kondisi makro seperti pandemi COVID-19, serta efektivitas lembaga pengelola dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Kenaikan tajam pada 2023–2024 mencerminkan pemulihan ekonomi yang kuat sekaligus meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban ZIS sebagai instrumen pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.

Salah satu faktor penting dalam perspektif ekonomi Islam adalah pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). ZIS merupakan instrumen redistribusi

pendapatan yang secara langsung ditujukan untuk membantu masyarakat miskin. Penyaluran ZIS yang efektif diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik, mendorong aktivitas ekonomi, dan menurunkan angka kemiskinan. Hal yang demikian ini sesuai dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sejumlah penelitian terdahulu menyatakan bahwa ZIS memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan diantaranya Kholid, 2019¹⁶; Sucipto, 2019¹⁷; Muiz et al., 2023¹⁸; Indra et al., 2024¹⁹. Namun, beberapa penelitian lain menunjukkan hasil sebaliknya, seperti penelitian Aufiya & Ervani, 2025²⁰ bahwa ZIS tidak selalu berpengaruh signifikan apabila distribusinya tidak tepat sasaran atau jumlahnya tidak memadai. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan perlunya pengkajian lebih lanjut mengenai pengaruh ZIS di wilayah dengan karakteristik sosial ekonomi tertentu seperti Kabupaten Ciamis.

Selain itu, berbagai faktor dapat memengaruhi tingkat kemiskinan yang tinggi atau rendah di suatu daerah dan jumlah penduduk adalah salah satunya. Setiap tahun, jumlah penduduk bergantung pada jumlah kelahiran. Jika jumlah penduduk tidak dapat dikontrol, pemerintah akan menghadapi masalah karena angka kemiskinan akan meningkat. Penambahan penduduk dapat mengurangi tingkat kemiskinan, tergantung pada seberapa banyak orang yang memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Penambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat di Kabupaten Ciamis diduga menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan, baik secara

¹⁶ Amin Nur Kholid, "Dampak Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan : Studi Kasus LAZDAI Dan DPU-DT Di Bandar Lampung," *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat* 2, no. 01 (2019): 65–105, <https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v2i01.40>.

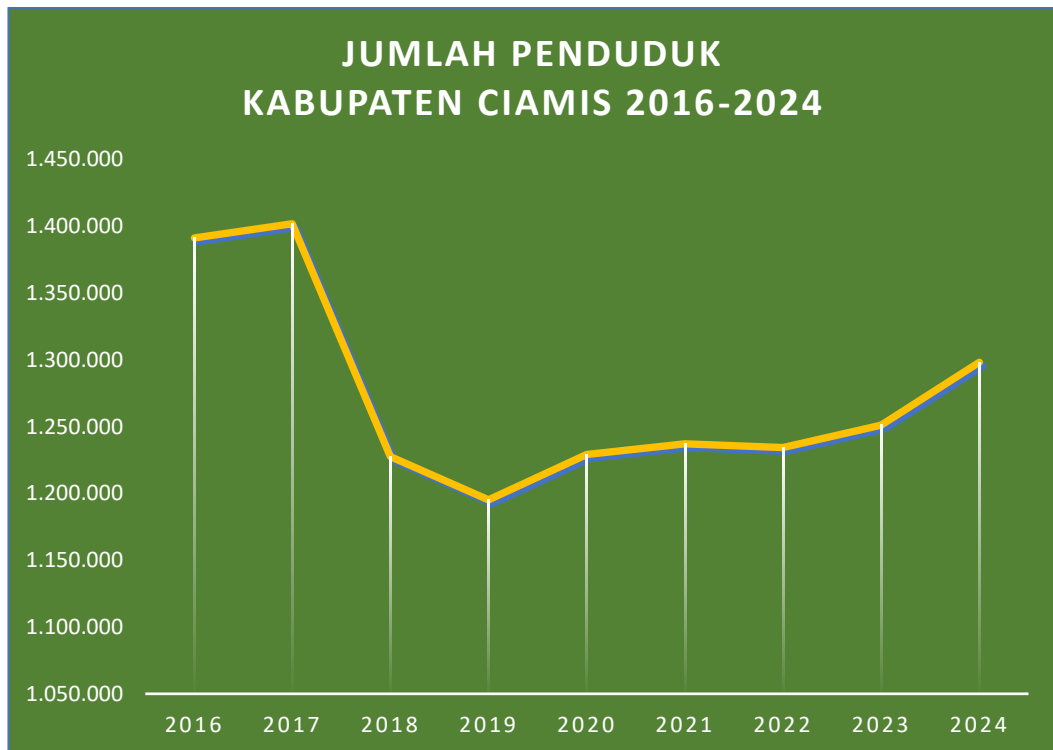
¹⁷ Sucipto dan Setiadi, "Pengelolaan Sampah Anorganik Melalui Bank Sampah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Desa Plandaan Kecamatan Plandaan."

¹⁸ Muiz dkk., "Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia Periode 2013-2022."

¹⁹ Indra dkk., "Analisis Penyaluran Dana ZIS Di BAZNAS Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan."

²⁰ Aufiya dan Ervani, "Pengaruh Penyaluran ZIS, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat Periode 2020-2024."

nasional maupun di Kabupaten Ciamis. Kenaikan jumlah penduduk dapat menambah beban pembangunan, terutama dalam penyediaan kebutuhan dasar. Data sekunder dari BPS Kabupaten Ciamis menunjukkan bahwa jumlah penduduk di daerah tersebut terus mengalami peningkatan pada tahun 2016 sampai 2024, sebagaimana ditampilkan di grafik berikut:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Gambar 1.3

Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2024

Berdasarkan Tabel 4.3, jumlah penduduk Kabupaten Ciamis mengalami dinamika yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2016–2024. di masa 2016, jumlah penduduk adalah 1.390.942 jiwa, kemudian naik pada tahun 2017 menjadi 1.401.423 jiwa. Namun, pada tahun 2018 terjadi penurunan yang sangat tajam menjadi 1.227.235 jiwa, dan kembali turun pada tahun 2019 menjadi 1.195.000 jiwa. Penurunan drastis dalam dua tahun ini tidak semata-mata mencerminkan perpindahan penduduk, tetapi lebih berkaitan dengan proses pemutakhiran data kependudukan, penertiban data duplicate (NIK ganda), serta penyempurnaan basis

data administrasi kependudukan oleh Dinas Dukcapil. Koreksi data tersebut umum terjadi di berbagai kabupaten/kota pada periode tersebut, sehingga berdampak pada turunnya angka penduduk secara statistik. Memasuki tahun 2020, jumlah penduduk kembali menunjukkan tren peningkatan, yaitu menjadi 1.229.000 jiwa dan terus naik menjadi 1.237.000 jiwa pada tahun 2021. Meskipun tahun 2022 sempat mengalami sedikit penurunan menjadi 1.234.000 jiwa, angka tersebut kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 1.251.000 jiwa. Puncaknya, di priode 2024 jumlah penduduk berada dikisaran 1.297.783 jiwa, menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan yang konsisten. Kenaikan ini dapat dikaitkan dengan stabilitas ekonomi daerah pascapandemi, meningkatnya mobilitas penduduk, serta perbaikan sistem administrasi kependudukan yang semakin akurat. Secara keseluruhan, pola dalam tabel menunjukkan bahwa setelah mengalami koreksi data yang signifikan pada 2018–2019, jumlah penduduk Kabupaten Ciamis kembali stabil dan menunjukkan pertumbuhan hingga akhir periode penelitian.

Salah satu faktor demografi yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah adalah jumlah penduduknya. Menurut teori Malthusian dan teori transisi demografi, ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya ekonomi dapat menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin karena pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan kesempatan kerja. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat meningkatkan tekanan terhadap sumber daya ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, dan kemampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan dasar. Mereka yang paling rentan terhadap kemiskinan adalah mereka yang tidak memiliki pendidikan atau keterampilan.²¹

Pada konteks pembangunan wilayah, besarnya jumlah penduduk dapat menimbulkan dua dampak ekonomi yang berbeda. apabila pertumbuhan penduduk tidak dbarengi dengan terbukanya lapangan kerja yang baru, maka

²¹ Bernando Aldo Yosua Tambunan Dkk., "Hubungan Antara Fertilitas, Mortalitas Dan Migrasi Terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk Di Indonesia," *MANTAP: Journal Of Management*

beban tanggungan rumah tangga meningkat, tingkat pengangguran bertambah, dan daya beli masyarakat menurun, sehingga mendorong naiknya angka kemiskinan. Sebaliknya, apabila meningkatnya jumlah penduduk diisi oleh penduduk usia produktif (bonus demografi), maka pertumbuhan penduduk justru dapat mendukung peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan kemiskinan²². Oleh karena itu, pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan bersifat kontekstual dan sangat ditentukan oleh kapasitas ekonomi daerah.

Penelitian terdahulu memberikan bukti empiris mengenai hubungan tersebut. Juardi. 2023 hasil penelitiannya menyatakan jumlah penduduk berpengaruh signifikan pada peningkatan kemiskinan dikarenakan pertumbuhan yang tidak sejalan dengan kesempatan kerja²³. Rafi 2021 juga menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan pada daerah dengan struktur ekonomi yang lemah. Namun, penelitian Ramadhani & Setyowati 2024 menunjukkan hasil yang berbeda, pada penelitiannya menemukan jumlah penduduk tidak selalu berpengaruh signifikan apabila pertumbuhan ekonomi daerah mampu menyerap tambahan tenaga kerja. Perbedaan temuan tersebut menegaskan bahwa pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan sangat bergantung pada kondisi sosial ekonomi lokal, termasuk kualitas tenaga kerja, pendidikan, dan pengadaan tenaga kerja di pasar kerja wilayah. Dengan demikian, jumlah penduduk menjadi variabel penting dalam analisis penurunan kemiskinan karena pertumbuhannya secara langsung memengaruhi struktur ekonomi, distribusi pendapatan, dan beban ketergantungan rumah tangga. Dalam konteks Kabupaten Ciamis, perubahan jumlah penduduk selama 2016–2024 memiliki implikasi besar terhadap kemampuan daerah dalam mengurangi kemiskinan, sehingga variabel ini perlu dianalisis secara mendalam dalam penelitian.

²² Syafirah dkk., “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Makassar.”

²³ Juardi dkk., “Analisis Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, PDRB, Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Selatan.”

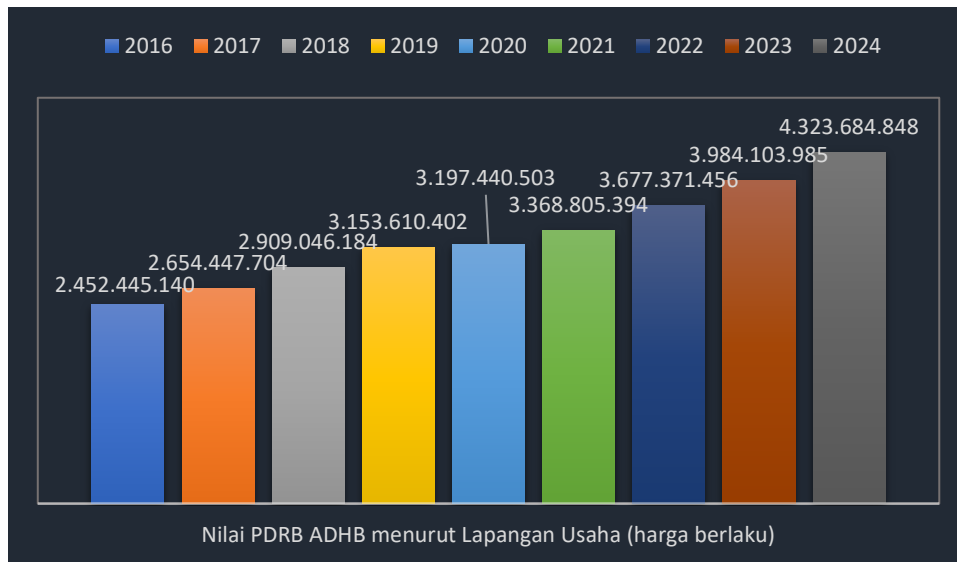
Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dalam hal Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) bisa menentukan seberapa baik suatu daerah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan. Tingkat PDRB yang tinggi dapat menjadi modal bagi daerah untuk mencapai pengentasan kemiskinan.²⁴ Dua jenis PDRB, PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan, merupakan nilai total hasil akhir yang diperoleh dari unit lapangan usaha. PDRB yang lebih tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki peluang yang lebih besar untuk pembangunan, yang secara tidak langsung dapat menekan angka kemiskinan. Oleh karena itu, jika PDRB suatu daerah tinggi, maka daerah tersebut memiliki peluang yang lebih besar untuk membangun dan memperbaiki sarana dan prasarannya, sehingga meningkatkan ekonominya²⁵. Selain itu, PDRB yang tinggi juga akan membantu masyarakat yang menganggur dengan membuka lapangan pekerjaan melalui pemberdayaan potensi daerahnya, termasuk potensi alam, modal atau yang lainnya. Sebaliknya, jika PDRB suatu daerah rendah, maka kemampuannya untuk mendanai pembangunan daerahnya akan menjadi terbatas, dan peluang untuk menekan angka kemiskinan akan menjadi sangat kecil²⁶.

Menurut data sekunder yang dikumpulkan penulis dari Badan Pusat Statistik, PDRB Kabupaten Ciamis dari tahun 2019 sampai 2023 terus mengalami peningkatan sebagaimana tampak pada gambar berikut:

²⁴ Muliza, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Nagan Raya," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 9 Juli 2020, 63–73, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v12i01.361>.

²⁵ Fitriany, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, Belanja Daerah Dan Zakat Terhadap Kemiskinan Di Kota Dumai."

²⁶ Puspita, "Pengaruh Tingkat Pengangguran Dan PDRB Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten Periode Tahun 2017-2021."



Gambar 1.4

PDRB dan Kemiskinan Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2024

Data menunjukkan bahwa PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ciamis menunjukkan pertumbuhan yang konsisten sepanjang tahun 2016–2024. Pada tahun 2016, nilai PDRB tercatat sebesar Rp2,45 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp2,65 triliun di tahun 2017 dan Rp2,91 triliun pada tahun 2018. Tren kenaikan berikut berlanjut pada 2019 dengan nilai mencapai Rp3,15 triliun, mencerminkan ekspansi ekonomi daerah yang stabil sebelum masa pandemi. Bahkan pada tahun 2020—ketika sebagian besar daerah mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19—PDRB Ciamis masih menunjukkan kenaikan menjadi Rp3,19 triliun, menandakan bahwa struktur ekonomi Ciamis relatif tangguh dan ditopang oleh sektor-sektor yang tetap produktif selama pandemi seperti pertanian, perdagangan lokal, dan sektor jasa dasar.

Memasuki tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis kembali menguat dengan nilai PDRB mencapai Rp3,36 triliun, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp3,67 triliun. Kenaikan ini memperlihatkan pulihnya ekonomi yang cepat pasca fase pandemi, dengan ditopang oleh meningkatnya aktivitas konsumsi rumah tangga, pemulihan sektor perdagangan, serta peningkatan investasi lokal. Pertumbuhan terus berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai mencapai Rp3,98 triliun, dan mencapai puncaknya pada

2024 sebesar Rp4,32 triliun. Secara keseluruhan, tren PDRB ADHB menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, stabil, dan berkelanjutan di Kabupaten Ciamis sepanjang periode 2016–2024, mencerminkan peningkatan kapasitas produksi daerah, perbaikan infrastruktur ekonomi, serta meningkatnya kontribusi sektor-sektor utama pada perekonomian di tingkat daerah.

Salah satu indikator penting yang menggambarkan kapasitas dan kinerja ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menunjukkan nilai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah. Karena pertumbuhan ekonomi memberi orang lebih banyak kesempatan untuk memperoleh pendapatan, bekerja, dan membeli barang, peningkatan PDRB mungkin menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam penurunan kemiskinan²⁷. Menurut teori pertumbuhan ekonomi klasik, pertumbuhan output akan mendorong turunya kemiskinan melalui mekanisme ekspansi lapangan kerja dan peningkatan pendapatan perkapita. Keterkaitan antara PDRB dan penurunan kemiskinan dijelaskan pula oleh teori *trickle-down effect*, yang menagatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa mengalir ke seluruh lapisan lapisan masyarakat melalui peningkatan investasi, konsumsi, dan produktivitas²⁸. Ketika PDRB meningkat, maka aktivitas ekonomi daerah meningkat, investasi sektor riil bertambah, dan permintaan tenaga kerja naik, sehingga masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan. Namun, distribusi pertumbuhan sangat memengaruhi seberapa efektif pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan. Jika pertumbuhan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, maka peningkatan PDRB tidak otomatis mendorong penurunan kemiskinan.

²⁷ Mukti dan Soraya, “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan Dan Tenaga Kerja.”

²⁸ Anggraini dan Rusdiansyah, “ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PDRB PER KAPITA DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2010-2017.”

Tabel 1.1
Data Kumulatif Variabel Penelitian

Tahun	Kemiskinan	ZIS (Rp)	Penduduk	PDRB
2016	987.700	21.714.065.864	1.390.942	2.452.445.140
2017	1.955.300	40.945.936.507	2.792.365	5.106.892.844
2018	2.812.500	45.685.002.401	4.019.600	8.015.939.028
2019	3.606.600	51.084.538.188	5.214.600	11.169.549.430
2020	4.520.500	58.534.529.227	6.443.600	14.366.989.933
2021	5.486.500	59.585.073.709	7.680.600	17.735.795.327
2022	6.426.100	65.503.756.380	8.914.600	21.413.166.783
2023	7.334.500	81.965.948.622	10.165.600	25.397.270.768
2024	8.242.400	100.373.058.165	11.463.383	29.720.955.616

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan data kumulatif periode tahun 2016–2024, perkembangan variabel penelitian menunjukkan dinamika yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Secara keseluruhan, pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan total akumulasi mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Di sisi lain, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menunjukkan tren peningkatan yang stabil, yang mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ciamis.

Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan. Secara kumulatif, jumlah penduduk miskin masih menunjukkan angka yang relatif besar, yang mengindikasikan bahwa permasalahan kemiskinan masih menjadi isu penting di daerah tersebut. Selain itu, jumlah penduduk yang terus meningkat juga

berpotensi menjadi faktor yang memperbesar tekanan terhadap tingkat kemiskinan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian-penelitian terdahulu memperkuat pengaruh positif antara PDRB dan penurunan kemiskinan. Herlambang & Rachmawati 2022 menemukan peningkatan PDRB secara signifikan dapat menurunkan angka kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi yang inklusif²⁹. Penelitian Ramadhani & Setyowati 2024 serta Syahputri & Fisabilillah 2022 juga menyatakan bahwa PDRB memiliki efek negatif signifikan pada angka kemiskinan, artinya semakin tinggi PDRB maka akan makin rendah angka kemiskinan di suatu wilayah³⁰. Akan tetapi, berbedanya penemuan ditunjukkan oleh Pratiwi & Saroni 2023 dan Rafi 2021, yang menemukan bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan pada kemiskinan. Mereka menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi belum tentu selalu dapat mengurangi tingkat kemiskinan ketika distribusi pendapatan tidak merata atau pertumbuhan hanya terjadi pada sektor-sektor tertentu yang tidak padat karya.

Hasil yang berbeda tersebut bisa dimaknai bahwa pengaruh PDRB terhadap penurunan kemiskinan bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah, sektor unggulan, serta kualitas pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dalam konteks Kabupaten Ciamis, PDRB yang didominasi oleh bidang pertanian, perdagangan, dan sektor jasa. PDRB memiliki peranan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh sebab itu, analisis pengaruh PDRB terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Ciamis menjadi penting supaya bisa memahami sejauh mana pertumbuhan ekonomi daerah mampu mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata.

Penelitian ini memiliki kebaruan penting karena menggabungkan tiga variabel utama pendistribusian ZIS, jumlah penduduk, dan PDRB dalam satu model empiris untuk menjelaskan penurunan kemiskinan di tingkat kabupaten. Berbagai

²⁹ Herlambang dkk., "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tempat Pembuangan Sampah Kabupaten Gunungkidul."

³⁰ Pratiwi dan Saroni, "Pengaruh PDRB, Pengangguran, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011-2021."

penelitian terdahulu hanya menganalisis ZIS secara parsial atau fokus pada variabel makro seperti jumlah penduduk, pendidikan, atau PDRB tanpa mempertimbangkan peran ZIS sebagai instrumen distribusi kesejahteraan dalam ekonomi Islam. Dengan mengintegrasikan ketiga variabel tersebut, penelitian ini menawarkan model analisis yang lebih komprehensif dan mampu menangkap dinamika kemiskinan secara lebih utuh. Kebaruan lain terletak pada penggunaan periode penelitian yang panjang, yaitu 2016–2024, hingga masuk pada kondisi sebelum pandemi, saat pandemi, serta dimasa pemulihan ekonomi, yang belum banyak diteliti sebelumnya. Penelitian ini juga menggunakan variabel dependen penurunan kemiskinan (Kemiskinan), bukan tingkat kemiskinan statis sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian terdahulu. Penggunaan variabel perubahan ini memungkinkan penelitian menangkap dinamika penurunan kemiskinan secara lebih sensitif dan akurat. Oleh sebab itu, riset ini memberikan sumbangan ilmiah yang penting dalam memahami determinan penurunan kemiskinan pada level daerah, melalui perpaduan pendekatan ekonomi pembangunan dan ekonomi Islam dalam konteks lokal Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel distribusi zakat, infak dan shadaqah (ZIS), jumlah penduduk, dan PDRB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memprediksi dan menganalisis bagaimana tingkat kemiskinan di Kabupaten Ciamis dipengaruhi oleh variabel-variabel ini. Adapun pemilihan variabel-variabel di atas dikarenakan seringkali variabel-variabel tersebut dijadikan instrumen program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Untuk itu, penulis mengambil judul “Pengaruh Pendistribusian Dana ZIS, Jumlah Penduduk dan PDRB terhadap Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2024”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini disusun untuk mengkaji secara empiris pengaruh pendistribusian dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS), jumlah penduduk, serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Tahun 2016–2024.

Fokus penelitian ini mencakup pengujian pengaruh masing-masing variabel secara parsial maupun simultan. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendistribusian dana Zakat infaq dan shodaqoh berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2024?
2. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2024?
3. Apakah PDRB berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2024?
4. Apakah distribusi dana ZIS, jumlah penduduk, dan PDRB berpengaruh simultan terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendistribusian zakat infaq dan shodaqoh terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2024?
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2024?
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh PDRB terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2024?
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendistribusian dana ZIS, jumlah penduduk, dan PDRB terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2024?

D. Manfaat Penelitian

1. Dari Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan untuk kemajuan ilmu ekonomi Islam dan ekonomi pembangunan. Penelitian ini akan memfokuskan pada studi hubungan antara dinamika kemiskinan regional dan distribusi kekayaan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Studi ini bertujuan untuk memperluas kerangka teori tentang bagaimana instrumen zakat, infak, dan sedekah (ZIS) berfungsi sebagai ibadah sosial dan mekanisme distribusi ekonomi yang efektif yang membantu mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini meningkatkan pemahaman kita tentang teori keadilan distributif ekonomi Islam, yang menekankan pada keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori bahwa pembangunan ekonomi yang berlandaskan keadilan sosial dan spiritual akan lebih berkelanjutan dibandingkan pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan PDRB. Pada konteks berikut, hasil penelitian bisa menjadi pengayaan empiris bagi teori ekonomi pembangunan Islam, terutama terkait bagaimana intervensi sosial melalui pendistribusian ZIS dapat berinteraksi dengan variabel makroekonomi seperti jumlah penduduk dan PDRB dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Lebih jauh, penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi (PDRB), jumlah penduduk, dan kemiskinan pada konteks economic Islam. Secara teoretis, penelitian ini menguji kembali validitas teori trickle-down effect yang sering digunakan dalam ekonomi konvensional bahwa pertumbuhan ekonomi akan menetes ke lapisan bawah Masyarakat namun dikaji melalui perspektif Islam yang menekankan pada pemerataan dan distribusi adil melalui instrumen ZIS. Dengan demikian, penelitian ini menjadi jembatan konseptual antara teori ekonomi pembangunan konvensional dan teori ekonomi Islam, serta membuka peluang pengembangan model pembangunan berkeadilan berbasis nilai syariah.

2. Dari sisi metodologis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan teoretis dalam bentuk model empiris yang menggabungkan variabel ekonomi makro dan instrumen sosial-keagamaan. Model ini bisa dipergunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya dalam menjelaskan hubungan kompleks antara faktor sosial, spiritual, dan ekonomi dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan menguji variabel-variabel tersebut secara simultan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini memperkaya pendekatan teoritis dalam analisis pembangunan berkeadilan dalam kerangka ekonomi Islam kontemporer.

3. Dari Segi Praktis Hasil

Penulis berharap hasil pada penelitian ini dapat memberikan manfaat serta memberikan sumbangan praktis untuk :

- a. Bagi Peneliti, sebagai bahan rujukan untuk peneliti yang akan melaksanakan penelitian mengenai pengaruh distribusi Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS), jumlah penduduk dan PDRB terhadap Kemiskinan.
- b. Bagi lembaga/objek penelitian, sebagai sumbangsih dan masukan bagi BAZNAS Ciamis pada pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqoh agar bisa sampai tepat sasaran pada mustahiq, sehingga dana ZIS dapat dijadikan alternatif untuk program pemerintah untuk sumber dana guna meningkatkan IPM dan menekan tingkat kemiskinan.
- c. Untuk pemerintah Kabupaten Ciamis dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi besarnya pengaruh jumlah penduduk dan PDRB di Kabupaten Ciamis.

E. Penelitian Terdahulu

Pengaruh distribusi dana ZIS, jumlah penduduk, dan PDRB terhadap kemiskinan telah dibahas dalam beberapa penelitian. Penelitian ini akan menggunakan temuan penelitian sebelumnya sebagai referensi dan perbandingan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Variabel & Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Ayu Sindi (2021)	Pengaruh ZIS dan PDRB terhadap Kemiskinan	X1 = ZIS, X2 = PDRB; Regresi Linier	ZIS negatif signifikan; PDRB tidak signifikan
2	Rafi (2021)	Pengaruh PDRB, IPM & ZIS terhadap Kemiskinan Jawa Tengah	X1 = PDRB, X2 = IPM, X3 = Zakat; Panel FEM	ZIS & IPM signifikan negatif; PDRB tidak signifikan
3	Aufiya & Ervani (2025)	Pengaruh ZIS, PDRB, Pengangguran & PAD terhadap Kemiskinan	X1 = ZIS, X2 = PDRB, X3 = TPT, X4 = PAD; REM Panel	PDRB & TPT signifikan; ZIS & PAD tidak signifikan
4	Muiz et al. (2023)	Pengaruh ZIS terhadap Kesejahteraan Mustahik	X1 = ZIS; Regresi Linier	ZIS signifikan meningkatkan kesejahteraan
5	Muliza (2020)	Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB terhadap Kemiskinan	X1 = JP, X2 = PDRB; Time Series	Tidak signifikan parsial; signifikan simultan
6	Sucipto et al. (2019)	Pengaruh ZIS terhadap Kemiskinan di Jambi	X1 = Zakat; Regresi Sederhana	ZIS signifikan menurunkan kemiskinan
7	Islami & Fitrianto (2023)	Pengaruh Penyaluran ZIS, Inflasi, Ketimpangan terhadap Kemiskinan	X1 = ZIS, X2 = Inflasi, X3 = Gini; Panel	ZIS signifikan menurunkan kemiskinan
8	Kholid (2019)	Pengaruh ZIS terhadap Penurunan Kemiskinan	X1 = ZIS; Regresi Linier	ZIS menurunkan kemiskinan
9	Juardi et al. (2023)	Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, PDRB terhadap Kemiskinan	X1 = JP, X2 = Pendidikan, X3 = PDRB; Panel Data	JP positif signifikan; Pendidikan & PDRB negatif signifikan
10	Marlina & Usman	Pengaruh PDRB dan Pengeluaran Pemerintah	X1 = PDRB, X2 = Belanja Pemerintah;	PDRB menurunkan kemiskinan;

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Variabel & Metode Analisis	Hasil Penelitian
	(2020)	terhadap Kemiskinan	Regresi Linier	belanja pemerintah tidak signifikan
11	Hany & Islamiyati (2020)	Pengaruh ZIS dan Faktor Makro Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan	X1 = ZIS, X2 = Inflasi, X3 = PDRB; Regresi Linier	ZIS & PDRB negatif signifikan; inflasi positif signifikan
12	Herlambang & Rachmawati (2023)	Pengaruh PDRB, IPM, dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan	X1 = PDRB, X2 = IPM, X3 = JP; OLS	PDRB & IPM negatif signifikan; JP positif signifikan
13	Indra et al. (2024)	Pengaruh Penyaluran Dana ZIS BAZNAS terhadap Kemiskinan	X1 = ZIS; Regresi Sederhana	ZIS berpengaruh signifikan menurunkan kemiskinan
14	JIMAS (2022)	Pengaruh jumlah penduduk, PDRB dan pengangguran terhadap Kemiskinan	X1 = JP, X2 = Pengangguran, X3 = PDRB; Regresi Linier	JP & Pengangguran positif signifikan; PDRB negatif signifikan
15	Ramadhani & Setyowati (2024)	Pengaruh jumlah penduduk, GDP dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di ASEAN	X1 = GDP, X2 = Pengangguran, X3 = JP; FEM Panel	GDP tidak signifikan; Pengangguran & jumlah Penduduk negatif signifikan
16	Marlinah (2020)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, PDRB terhadap Kemiskinan	X1 = Pengeluaran, X2 = PDRB; Regresi Linier	PDRB signifikan; Pengeluaran tidak signifikan
17	Maro et al. (2022)	Pengaruh pendidikan, pendapatan dan PDRB terhadap kemiskinan	X1 = Pendidikan, X2 = Pendapatan, X3 = PDRB; Regresi Linier	Pendidikan & pendapatan signifikan; PDRB tidak signifikan

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Variabel & Metode Analisis	Hasil Penelitian
18.	Syahputri & Fisabilillah (2022)	Pengaruh Pengangguran, UMK, PDRB terhadap Kemiskinan Jawa Timur	X1 = Pengangguran, X2 = UMK, X3 = PDRB; FEM Panel	Pengangguran & UMK positif signifikan; PDRB negatif signifikan

Berdasarkan hasil tela'ah terhadap berbagai penelitian terdahulu, bisa disimpulkan bahwa factor factor yang memengaruhi kemiskinan berasal merupakan hasil kombinasi variabel ekonomi makro, demografi, dan instrumen ekonomi Islam. Dari sisi ekonomi makro, Produk Domestik Regional Bruto merupakan variabel yang paling sering digunakan dan menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian besar penelitian, seperti Marlina dan Usman (2020), Herlambang dan Rachmawati (2023), Juardi et al. (2023), Syahputri dan Fisabilillah (2022), serta JIMAS (2022), menemukan bahwa PDRB berdampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan; temuan ini menunjukkan bahwa meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah dapat membantu menurunkan kemiskinan. melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, beberapa penelitian lain, seperti Pratiwi dan Saroni (2023), Ayu Sindi (2021), Rafi (2021), Maro et al. (2022), serta Ramadhani dan Setyowati (2024), menemukan bahwa PDRB tidak memiliki pengaruh yang signifikan atau bahkan positif terhadap kemiskinan, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu merata dan inklusif.

Dari sisi demografi, jumlah penduduk secara umum ditemukan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian Herlambang dan Rachmawati (2023), Juardi et al. (2023), JIMAS (2022), serta Ramadhani dan Setyowati (2024) menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk cenderung meningkatkan kemiskinan apabila tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Temuan ini sejalan dengan teori Malthusian dan transisi demografi. Meskipun demikian, terdapat penelitian

yang menemukan hasil berbeda, seperti Muliza (2020), yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak signifikan secara parsial, namun signifikan secara simultan bersama variabel ekonomi lainnya. Hal ini menegaskan bahwa pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan sangat bergantung pada konteks dan struktur ekonomi wilayah.

Sementara itu, dari perspektif ekonomi Islam, mayoritas riset menghasilkan pendistribusian dana ZIS berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Penelitian Kholid (2019), Sucipto et al. (2019), Hany dan Islamiyati (2020), Indra et al. (2024), Islami dan Fitrianto (2023), Muiz et al. (2023), serta Ayu Sindi (2021) menemukan bahwa ZIS memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan atau dampak positif terhadap kesejahteraan orang miskin. Namun, tidak semua penelitian menunjukkan hasil yang konsisten. Aufiyya dan Ervani (2025) menemukan bahwa ZIS tidak signifikan terhadap kemiskinan ketika dianalisis bersama variabel ekonomi lainnya, yang mengindikasikan bahwa efektivitas ZIS sangat dipengaruhi oleh pola distribusi, skala penyaluran, serta sinerginya dengan kondisi ekonomi daerah.

Terlepas dari fakta bahwa sejumlah studi sebelumnya telah menyelidiki bagaimana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), jumlah penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap kemiskinan, hasil yang diperoleh masih menunjukkan ketidakkonsistenan baik dari sisi arah pengaruh maupun signifikansinya. Menurut banyak penelitian, PDRB berdampak negatif dan signifikan pada kemiskinan., namun penelitian lain justru menunjukkan bahwa PDRB tidak signifikan atau bahkan berpengaruh positif. Hal serupa juga terjadi pada variabel jumlah penduduk, di mana sebagian penelitian menyatakan berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sementara penelitian lainnya menunjukkan pengaruh yang lemah atau tidak signifikan. Inkonsistensi hasil ini mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel ekonomi dan demografi terhadap kemiskinan sangat bergantung pada konteks wilayah, periode waktu, serta struktur ekonomi daerah.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih menganalisis variabel ZIS, jumlah penduduk, dan PDRB secara parsial, sehingga belum mampu menjelaskan interaksi ketiganya dalam satu kerangka analisis yang utuh. Penelitian yang mengintegrasikan instrumen ekonomi Islam (ZIS) dengan variabel ekonomi makro dan demografi dalam satu model empiris masih sangat terbatas, khususnya pada level kabupaten. Di sisi lain, mayoritas penelitian menggunakan tingkat kemiskinan statis sebagai variabel dependen, sehingga belum sepenuhnya menangkap dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menguji secara simultan pengaruh pendistribusian ZIS, jumlah penduduk, dan PDRB terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Ciamis selama periode 2016–2024, sehingga diharapkan mampu memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif dan kontekstual bagi perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan di daerah.

F. Kerangka Berfikir

Penelitian ini berangkat dari gagasan bahwa interaksi antara elemen ekonomi, sosial, dan demografi yang saling memengaruhi menyebabkan penurunan kemiskinan. Dalam konteks pembangunan daerah, keberhasilan dalam mengurangi kemiskinan dipengaruhi oleh besarnya aktivitas ekonomi yang ditunjukkan oleh PDRB, serta efektivitas distribusi pendapatan dan karakteristik kependudukan. Pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) berperan sebagai instrumen redistribusi berbasis keadilan sosial, sementara jumlah penduduk merefleksikan tekanan maupun potensi tenaga kerja dalam perekonomian. Oleh karena itu, kerangka berpikir penelitian ini dirancang untuk menjelaskan bagaimana distribusi ZIS, jumlah penduduk, dan PDRB memengaruhi penurunan kemiskinan di Kabupaten Ciamis secara parsial maupun bersamaan.

a. Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) terhadap Penurunan Kemiskinan

Teori distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam dan teori kesejahteraan sosial Islam digunakan untuk menjelaskan secara teoretis hubungan antara pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) terhadap penurunan kemiskinan. Teori distribusi pendapatan Islam menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh terakumulasi pada kelompok tertentu, melainkan harus didistribusikan kepada kelompok yang membutuhkan guna menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. ZIS berfungsi sebagai instrumen redistribusi yang secara langsung mengalihkan sumber daya ekonomi dari kelompok mampu (muzakki) kepada kelompok miskin (mustahik), sehingga mampu mengurangi ketimpangan dan menekan tingkat kemiskinan (Kholid, 2019; Hany & Islamiyati, 2020). ZIS membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia, terutama pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*), dari sudut pandang teori kesejahteraan dan *maqāṣid al-sharīʿah*. Menurut teori ini, kemiskinan adalah kondisi yang memiliki banyak aspek, termasuk rendahnya pendapatan dan keterbatasan akses ke pangan, kesehatan, pendidikan, dan modal ekonomi. Akibatnya, diharapkan bahwa distribusi ZIS yang efektif akan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara menyeluruh dan berkelanjutan. (Islami & Fitrianto, 2023; Indra et al., 2024).

Mekanisme pengaruh ZIS terhadap penurunan kemiskinan dapat dijelaskan dengan dua jalur utama, yaitu jalur konsumtif serta jalur produktif. Pada jalur konsumtif, dana ZIS membantu mustahik memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, sehingga menurunkan tingkat kerentanan ekonomi. Sementara itu, pada jalur produktif, ZIS yang disalurkan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan ekonomi mampu meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan mustahik. Peningkatan pendapatan tersebut pada akhirnya mendorong mustahik keluar dari garis kemiskinan dan mengurangi jumlah penduduk miskin secara agregat. Temuan empiris dari berbagai penelitian terdahulu mendukung kerangka teoritis dan logis tersebut. Penelitian Kholid 2019, Sucipto et al. 2019, Hany dan Islamiyati 2020, Islami dan Fitrianto 2023, Selain itu, Indra et al. 2024 menunjukkan bahwa pendistribusian ZIS memiliki dampak negatif dan signifikan

terhadap kemiskinan. Dengan kata lain, peningkatan penyaluran dana ZIS dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, beberapa penelitian juga mencatat bahwa pengaruh ZIS menjadi tidak signifikan ketika penyalurannya masih bersifat konsumtif atau ketika dianalisis bersama variabel ekonomi makro lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas ZIS sangat ditentukan oleh pola distribusi, tata kelola, dan orientasi produktif dari penyaluran dana ZIS.

Berdasarkan kesesuaian antara landasan teori, logika ekonomi, dan temuan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana ZIS memiliki potensi kuat untuk menurunkan kemiskinan secara teoretis dan empiris. Oleh karena itu, pendistribusian dana ZIS diposisikan sebagai variabel independen utama yang dianggap secara rasional dan empiris memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Ciamis..

b. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penurunan Kemiskinan

Secara teoretis, teori Malthusian, teori transisi demografi, dan teori modal manusia menjelaskan hubungan antara jumlah penduduk dan kemiskinan. Teori Malthusian menyatakan bahwa jika pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada pertumbuhan sumber daya dan output ekonomi, itu akan meningkatkan kemiskinan karena tekanan terhadap ketersediaan lapangan kerja, pangan, dan pendapatan. Dalam hal ini, penambahan jumlah penduduk yang lebih besar akan meningkatkan kemiskinan. Teori transisi demografi memberikan perspektif yang lebih dinamis dengan menjelaskan bahwa dampak jumlah penduduk terhadap kemiskinan sangat bergantung pada tahap pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan penduduk cenderung meningkatkan kemiskinan karena tingginya rasio ketergantungan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Namun, pada tahap lanjut, ketika tingkat pendidikan dan kesehatan meningkat, pertumbuhan penduduk usia produktif justru dapat menjadi modal pembangunan yang mendorong penurunan kemiskinan. Oleh karena itu, jumlah penduduk tidak selalu berdampak negatif terhadap kemiskinan, melainkan bersifat kontekstual .

Secara logis, pasar tenaga kerja dan rasio ketergantungan berperan dalam pengaruh jumlah penduduk terhadap penurunan kemiskinan. Pasokan tenaga kerja akan meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan populasi yang cepat. Jumlah pengangguran dan setengah menganggur akan meningkat, meningkatkan kemiskinan, jika peningkatan ini tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Sebaliknya, apabila struktur penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif yang berkualitas dan terserap dalam aktivitas ekonomi, maka peningkatan jumlah penduduk justru dapat meningkatkan output dan pendapatan, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan kemiskinan. Temuan empiris dari penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang relatif konsisten namun tetap beragam. Studi yang dilakukan oleh Herlambang dan Rachmawati pada tahun 2023, Juardi et al. pada tahun 2023, Jimas 2022, dan Muliza pada tahun 2020 menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dengan demikian, peningkatan jumlah penduduk cenderung meningkatkan tingkat kemiskinan. Hasil-hasil ini mendukung teori Malthusian bahwa tekanan demografis dapat memperburuk kemiskinan. Namun, penelitian Ramadhani dan Setyowati 2024 menemukan bahwa jumlah penduduk justru berdampak negatif terhadap kemiskinan di wilayah tertentu; ini menunjukkan bahwa ketika penduduk produktif terlibat dalam aktivitas ekonomi dengan baik, peningkatan penduduk dapat membantu mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan kesesuaian antara teori, logika ekonomi, dan temuan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan namun tidak selalu searah terhadap penurunan kemiskinan. Pengaruh tersebut sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, struktur umur penduduk, dan kemampuan perekonomian daerah dalam menyerap tenaga kerja. Akibatnya, jumlah penduduk dianggap sebagai variabel independen dalam penelitian ini yang secara rasional dan empiris dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Ciamis.

c. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Penurunan Kemiskinan

Secara teoretis, teori pertumbuhan ekonomi klasik dan neoklasik, efek trickle-down, dan teori pembangunan inklusif menjelaskan hubungan antara PDRB dan penurunan kemiskinan. Teori pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa peningkatan output ekonomi daerah, yang ditunjukkan oleh kenaikan PDRB, akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan permintaan tenaga kerja, yang pada gilirannya akan menyebabkan penurunan kemiskinan. Dalam kerangka neoklasik, peningkatan output meningkatkan kapasitas produksi dan membuka lebih banyak peluang kerja, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah. Menurut teori trickle-down effect, peningkatan ekonomi akan "menetes" ke seluruh masyarakat melalui peningkatan investasi, konsumsi, dan produktivitas.

Ketika PDRB meningkat, sektor-sektor ekonomi berkembang dan menciptakan multiplier effect terhadap lapangan kerja serta pendapatan rumah tangga, sehingga kemiskinan dapat ditekan. Namun, teori ini juga menekankan bahwa efek penurunan kemiskinan hanya akan terjadi apabila pertumbuhan ekonomi bersifat merata dan tidak terkonsentrasi pada sektor tertentu saja.

Secara logis, mekanisme pengaruh PDRB terhadap penurunan kemiskinan berlangsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kenaikan pendapatan per kapita, dan perbaikan akses terhadap layanan dasar. Peningkatan PDRB mendorong ekspansi sektor produksi yang menyerap tenaga kerja, sehingga mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kenaikan pendapatan tersebut meningkatkan daya beli dan kemampuan rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan. Namun demikian, apabila peningkatan PDRB hanya dinikmati oleh kelompok tertentu atau sektor padat modal, maka dampaknya terhadap penurunan kemiskinan menjadi lemah. Temuan empiris dari penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam namun saling melengkapi. Penelitian Marlina dan Usman 2020, Herlambang dan Rachmawati 2023, Juardi et

al. 2023, Syahputri dan Fisabilillah 2022, serta Jimas pada tahun 2022 menemukan bahwa PDRB berdampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti bahwa peningkatan PDRB dapat menurunkan kemiskinan. Sebaliknya, penelitian Pratiwi dan Saroni 2023, Ayu Sindi 2021, Rafi 2021) Maro et al.(2022, serta Ramadhani dan Setyowati 2024 menemukan bahwa PDRB tidak signifikan atau bahkan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa pengaruh PDRB terhadap kemiskinan sangat bergantung pada struktur ekonomi daerah, kualitas pertumbuhan, dan kemampuan ekonomi daerah dalam menciptakan lapangan kerja yang inklusif.

Berdasarkan kesesuaian antara landasan teori, logika ekonomi, dan temuan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa PDRB memainkan peran penting dalam menurunkan kemiskinan. Namun, pengaruh peningkatan PDRB hanya akan efektif menurunkan kemiskinan jika pertumbuhan ekonomi inklusif dan mampu meningkatkan pendapatan orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Akibatnya, PDRB dianggap sebagai variabel independen dalam penelitian ini karena secara teoretis dan praktis dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Ciamis.

d. Pengaruh Distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), Jumlah Penduduk, dan PDRB terhadap Penurunan Kemiskinan

Secara teoretis, penurunan kemiskinan merupakan hasil interaksi antara mekanisme redistribusi pendapatan, dinamika demografi, dan kinerja ekonomi daerah. Dalam perspektif ekonomi Islam, teori distribusi pendapatan Islam dan teori maqāṣid al-sharī'ah menjelaskan bahwa distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin. ZIS bekerja secara langsung pada rumah tangga miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi, sehingga berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan.

Dari perspektif demografi, teori Malthusian dan teori transisi demografi menjelaskan bahwa, tergantung pada kualitas sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi untuk menyerap tenaga kerja, pertumbuhan jumlah penduduk dapat membantu atau menghambat penurunan kemiskinan. Jika pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan penciptaan lapangan kerja, itu akan meningkatkan tekanan terhadap pasar tenaga kerja dan meningkatkan kemiskinan. Sebaliknya, pertumbuhan penduduk dapat menjadi modal pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan.

Namun, menurut teori pertumbuhan ekonomi dan efek trickle-down, peningkatan PDRB ditunjukkan oleh peningkatan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Aktivitas ekonomi ini dapat mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan lapangan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, teori pembangunan inklusif menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya efektif menurunkan kemiskinan apabila bersifat merata dan mampu melibatkan kelompok berpendapatan rendah. Dengan demikian, PDRB berperan sebagai faktor struktural yang memperkuat atau melemahkan dampak kebijakan redistribusi dan dinamika demografi terhadap kemiskinan.

Secara logis, ketiga variabel tersebut saling berinteraksi dalam memengaruhi penurunan kemiskinan. Distribusi ZIS memberikan dampak langsung terhadap rumah tangga miskin melalui peningkatan daya beli dan kapasitas ekonomi. Jumlah penduduk memengaruhi besarnya tekanan dan peluang dalam perekonomian daerah, khususnya melalui pasar tenaga kerja. PDRB mencerminkan kemampuan ekonomi daerah dalam menyediakan lapangan kerja dan pendapatan. Ketika ZIS dikelola secara efektif, jumlah penduduk usia produktif terserap dalam kegiatan ekonomi, dan PDRB meningkat secara inklusif, maka penurunan kemiskinan akan terjadi secara lebih cepat dan berkelanjutan. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi tidak inklusif dan tekanan demografis tinggi, maka efektivitas ZIS dalam menurunkan kemiskinan akan menjadi terbatas.

Temuan empiris dari penelitian terdahulu mendukung kerangka integratif tersebut. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ZIS berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan diantaranya penelitian Kholid, 2019; Islami & Fitrianto, 2023; Indra et al., 2024. jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan baik secara positif maupun negatif tergantung konteks pada penelitian Juardi et al., 2023; Herlambang & Rachmawati, 2023, serta PDRB berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan meskipun hasilnya tidak selalu konsisten pada penelitian Marlina & Usman, 2020; Syahputri & Fisabilillah, 2022; Pratiwi & Saroni, 2023. Variasi hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh masing-masing variabel tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dalam menentukan dinamika kemiskinan di suatu daerah.

Berdasarkan kesesuaian antara landasan teori, logika ekonomi, dan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa distribusi ZIS, jumlah penduduk, dan PDRB secara bersamaan memiliki peran strategis dalam memengaruhi penurunan kemiskinan. Akibatnya, penelitian ini memposisikan ketiga variabel tersebut sebagai faktor utama dan diuji secara bersama-sama bagaimana pengaruh mereka terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Ciamis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran empiris yang lebih komprehensif dan kontekstual sebagai dasar untuk membuat kebijakan pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.

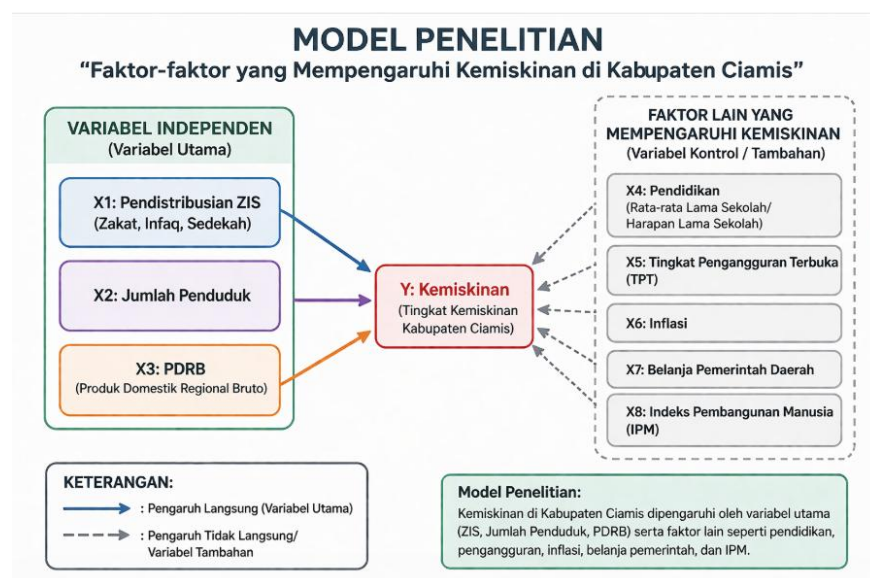
G. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat dan hipotesis penelitian, hipotesis statistika untuk studi pengaruh pendistribusian dana ZIS, jumlah penduduk, dan PDRB terhadap kemiskinan di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dari tahun 2016 hingga 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pendistribusian dana ZIS berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Ciamis Jawa barat Pada Periode 2016-2024.
2. Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Ciamis Jawa Barat Pada Periode 2016-2024.

3. PDRB berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Ciamis Jawa barat Pada Periode 2016-2024.
4. Distribusi ZIS, jumlah penduduk, kemiskinan, dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Ciamis Jawa barat Pada Periode 2016-2024.

Pada gambar 2.1 menunjukkan bagaimana model penelitian dalam penelitian ini dikembangkan berdasarkan penjelasan tersebut.:



SUNAN GUNUNG DJATI
Gambar 2.1

Model Penelitian